



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**UNIT KERJA :
PERTANIAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GUNAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI BESAR**
3. NHK : **794490**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.490.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/50 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 262.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA / MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA GL 200 R/ SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA 4 LANGKAH / SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	264.777.648
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.017.277.648
III. HUTANG	Rp.	8.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.009.277.648

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.